

Peran Pacific Islands Forum (PIF) dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Stabilitas Sosial di Fiji dan Papua Nugini

Nurul Hasanah¹, Putri Indah Sari², Roy Setiawan³, Bayu Putra SC⁴,

M Bintang Taufiiqul HR⁵

Universitas Sriwijaya

email: nh1506444@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Pacific Islands Forum (PIF) dalam meningkatkan ekonomi dan stabilitas sosial di Fiji serta Papua Nugini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian literatur dari berbagai sumber, seperti laporan resmi, jurnal, dan berita. Teori neoliberalisme digunakan untuk memahami kebijakan PIF dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Neoliberalisme menekankan peran pasar bebas, investasi asing, dan privatisasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIF membantu pemulihan ekonomi Fiji setelah pandemi dengan mendukung sektor pariwisata, pelatihan kerja, dan bantuan usaha kecil. Ekonomi Fiji tumbuh 6,3% pada 2022 karena kebijakan ini. Di Papua Nugini, PIF membantu pengembangan sektor pertanian dan perikanan untuk meningkatkan ekspor. Program ini membantu masyarakat mendapatkan penghasilan yang lebih stabil. Dalam bidang sosial, PIF membantu korban konflik etnis di Papua Nugini dengan memberikan bantuan darurat dan program perdamaian. Di Fiji, PIF mendukung pendidikan dan pelatihan kerja yang meningkatkan angka partisipasi sekolah menjadi 85% pada 2023. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan dalam kebijakan PIF. Ketergantungan negara-negara ini terhadap bantuan luar negeri masih tinggi. Selain itu, birokrasi yang lambat dan dampak perubahan iklim sering menghambat program yang dijalankan. Oleh karena itu, perlu strategi agar Fiji dan Papua Nugini lebih mandiri secara ekonomi. PIF perlu meningkatkan dukungan bagi usaha kecil dan menengah serta memperbaiki kerja sama dengan pemerintah setempat.

Kata kunci : Pacific Islands Forum, Neoliberalisme, Ekonomi, Stabilitas Sosial

Abstract

This research discusses the role of the Pacific Islands Forum (PIF) in improving economic and social stability in Fiji and Papua New Guinea. This research uses a qualitative method with a literature review from various sources, such as official reports, journals, and news. The theory of neoliberalism is used to understand PIF policies in promoting economic growth and social development. Neoliberalism emphasizes the role of free markets, foreign investment, and privatization in improving people's welfare. The results showed that PIF helped Fiji's economic recovery after the pandemic by supporting the tourism sector, job training, and small business assistance. Fiji's economy grew by 6.3% in 2022 due to these policies. In Papua New Guinea, PIF helped develop the agriculture and fisheries sectors to

increase exports. This program helps people earn a more stable income. In the social field, PIF helps victims of ethnic conflict in Papua New Guinea by providing emergency aid and peace programs. In Fiji, PIF supported education and job training that increased school enrollment to 85% by 2023. However, the research also found challenges in PIF policies. However, the study also found challenges in PIF policies. The countries' dependence on foreign aid remains high. In addition, slow bureaucracy and the impacts of climate change often hamper programs. Therefore, strategies are needed to make Fiji and Papua New Guinea more economically independent. PIF needs to increase support for small and medium enterprises and improve cooperation with local governments.

Keywords: Pacific Islands Forum, Neoliberalism, Economy, Social Stability

1. PENDAHULUAN

Ketahanan ekonomi dan stabilitas sosial merupakan dua pilar utama dalam menjaga keberlangsungan pembangunan suatu negara, terutama bagi negara-negara berkembang yang rentan terhadap berbagai krisis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Ketahanan ekonomi mencakup kemampuan suatu negara untuk menghadapi guncangan ekonomi seperti resesi, inflasi, dan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. Sementara itu, stabilitas sosial mencakup aspek kohesi sosial, penyelesaian konflik, serta akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Keduanya saling terkait dan saling memengaruhi: ketika ekonomi stabil, masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap kesejahteraan sosial, dan sebaliknya, stabilitas sosial memungkinkan terciptanya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks negara-negara di kawasan Pasifik seperti Fiji dan Papua Nugini, ketahanan ekonomi dan stabilitas sosial menjadi isu yang sangat penting. Fiji, sebagai negara kepulauan dengan perekonomian yang bergantung pada

pariwisata dan ekspor, sempat mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Meskipun mulai pulih dengan pertumbuhan sebesar 6,3% pada 2022, negara ini masih menghadapi tantangan dalam hal ketimpangan pembangunan antar wilayah dan keterbatasan akses layanan publik di daerah terpencil. Di sisi lain, Papua Nugini menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Sebagai negara yang 80% pendapatannya berasal dari sektor ekspor, Papua Nugini sangat rentan terhadap fluktuasi pasar global. Selain itu, konflik etnis dan tingkat kriminalitas yang tinggi turut menghambat proses pembangunan sosial dan ekonomi secara menyeluruh.

Pacific Islands Forum (PIF) adalah organisasi regional yang membantu meningkatkan ketahanan ekonomi dan stabilitas sosial di Pasifik (Pugu, 2024), termasuk Fiji dan Papua Nugini. Pada 2022, ekonomi Fiji tumbuh 6,3% setelah sempat turun akibat pandemi, dengan dukungan program pemulihan dari PIF.

Papua Nugini, yang 80% pendapatannya berasal dari ekspor, juga mendapat bantuan PIF untuk mengembangkan ekonominya. Program PIF untuk menghadapi perubahan iklim telah melindungi penduduk di pesisir (Alfarizi et al., 2022). Tapi, kedua negara masih bergantung pada bantuan luar negeri

dan menghadapi tantangan yang ada di negaranya. Selain ekonomi, PIF juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial di Fiji dan Papua Nugini. Konflik etnis di Papua Nugini menyebabkan banyak orang menjadi pengungsi, dan PIF berusaha membantu rekonsiliasi. Di Fiji, tingkat pengangguran turun dari 9,1% pada 2021 menjadi 7,5% pada 2023 berkat program pelatihan kerja dari PIF. Program pendidikan juga meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah di Fiji hingga 85% pada 2023. Bantuan sosial PIF membantu banyak keluarga miskin di Papua Nugini mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan (Aulia & Marzaman, 2023)

Neoliberalisme Institusional adalah teori yang menjelaskan bagaimana organisasi internasional membantu negara-negara bekerja sama dalam ekonomi dan politik (Yusran et al., 2017). Dalam peran Pacific Islands Forum (PIF), teori ini menunjukkan bagaimana organisasi ini mendukung Fiji dan Papua Nugini dalam meningkatkan ketahanan ekonomi mereka. PIF membantu kedua negara ini dengan memfasilitasi kerja sama dalam perdagangan, investasi, dan kebijakan ekonomi. Dengan adanya aturan dan program dari PIF, ekonomi Fiji dan Papua Nugini bisa lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada bantuan luar. Neoliberalisme Institusional percaya bahwa institusi seperti PIF sangat penting untuk menjaga keteraturan ekonomi global.

Teori neoliberalisme ini juga menjelaskan bagaimana PIF membantu menjaga stabilitas sosial di Fiji dan Papua Nugini. Organisasi ini mendukung negara-negara anggotanya dalam menyelesaikan konflik sosial, meningkatkan pendidikan, dan menciptakan lebih banyak lapangan

kerja (Yusran et al., 2017). Contohnya, PIF menjalankan program untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberi pelatihan kerja bagi Masyarakat.

Namun, di Papua Nugini, tingkat kriminalitas yang tinggi dan konflik antar komunitas sering menghambat upaya pembangunan sosial yang berkelanjutan. Meskipun PIF telah menginisiasi program rekonsiliasi, masih diperlukan langkah lebih lanjut untuk memastikan perdamaian jangka panjang. Di Fiji, meskipun tingkat pengangguran menurun, masih ada kesenjangan dalam akses pekerjaan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, masih banyak masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan berkualitas. Tantangan lain yang dihadapi adalah dampak perubahan iklim, yang semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir.

Berdasarkan elaborasi permasalahan tersebut, terdapat tiga rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana peran Pacific Islands Forum (PIF) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi di Fiji dan Papua Nugini. Kedua, bagaimana kontribusi PIF dalam menjaga stabilitas sosial di kedua negara tersebut. Ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi PIF dalam menjalankan program-programnya di Fiji dan Papua Nugini.

Jurnal penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PIF dalam meningkatkan ketahanan ekonomi dan stabilitas sosial di Fiji dan Papua Nugini. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi program-program PIF.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data dari berbagai sumber terpercaya, termasuk *report - report* di Internet yang berkaitan dengan PIF, data ekonomi dari jurnal - jurnal, dan penelitian lain seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal internasional maupun nasional. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis keberhasilan program yang telah diterapkan serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasi kebijakan PIF dalam sisi ekonomi dan stabilitas sosial di Fiji dan Papua Nugini yang termasuk ke dalam Negara Oceania.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi COVID-19 memberikan pukulan besar terhadap perekonomian Fiji, terutama karena ketergantungannya pada sektor pariwisata yang menyumbang hampir 40% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Penutupan perbatasan dan pembatasan perjalanan internasional menyebabkan anjloknya jumlah wisatawan hingga 87% pada tahun 2020 (Gunawan & Yulita, 2020). Dalam situasi ini, *Pacific Islands Forum* (PIF) hadir sebagai aktor penting dalam mendukung pemulihan ekonomi melalui berbagai program pemulihan yang dirancang secara inklusif.

Salah satu langkah utama PIF adalah

Penguatan sektor-sektor tersebut tentu tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya dukungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), yang menjadi ujung tombak kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, PIF melanjutkan intervensinya dengan mengarahkan perhatian ke program pemberdayaan UKM, yang akan dibahas pada bagian berikut.

Di Papua Nugini, sektor usaha kecil dan menengah (UKM) memegang peranan penting dalam menyokong ekonomi lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya di wilayah pedesaan yang sering kali terabaikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu, PIF menaruh perhatian besar pada pemberdayaan UKM, yang dipandang sebagai solusi untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan inklusi ekonomi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh PIF adalah menyediakan akses permodalan melalui program seperti Pacific SME Finance Initiative (Leo, 2011). Program ini memberikan pinjaman berbunga rendah kepada UKM, dengan fokus utama pada sektor perdagangan, pertanian, dan jasa. Selain itu, PIF juga menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan lokal untuk meningkatkan literasi keuangan dan memfasilitasi akses modal bagi pelaku UKM yang sebelumnya tidak dapat mengakses pinjaman formal.

Selain bantuan finansial, PIF juga memfokuskan program pelatihan bagi pelaku usaha kecil agar mereka dapat mengelola usaha dengan lebih efektif. Program pelatihan ini mencakup berbagai aspek penting seperti manajemen keuangan, pemasaran digital, serta pengelolaan risiko usaha. PIF bekerja sama dengan lembaga pelatihan lokal dan universitas untuk menyelenggarakan kursus dan workshop bagi pengusaha pemula, serta para pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis mereka (Gao dkk., 2022). Pelatihan ini dirancang untuk memberikan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan, sehingga para peserta bisa meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, serta

mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada.

Tidak hanya itu, PIF juga memberikan dukungan dalam pengembangan kapasitas digital bagi UKM di Papua Nugini, dengan memperkenalkan sistem e-commerce dan pemasaran online. Pelaku UKM di berbagai wilayah kini dapat memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar mereka, baik di tingkat domestik maupun internasional. Hal ini membuka peluang baru bagi produk lokal, seperti kerajinan tangan, kopi, dan makanan olahan, untuk dikenal lebih luas dan dipasarkan ke pasar global.

Berkat berbagai dukungan ini, UKM di Papua Nugini mengalami perkembangan yang signifikan. Data dari Bank of Papua New Guinea menunjukkan bahwa jumlah UKM yang aktif meningkat 22% dalam dua tahun terakhir, dan kontribusi UKM terhadap produk domestik bruto (PDB) negara mengalami peningkatan yang cukup berarti. Di samping itu, angka pengangguran berhasil ditekan dari 7,9% menjadi 6,5% berkat tumbuhnya sektor informal yang dipengaruhi oleh berkembangnya UKM (Budiarto dkk., 2018).

Dengan berbagai dukungan yang diberikan oleh PIF melalui bantuan modal dan pelatihan, UKM di Papua Nugini semakin kuat dan mandiri. Hal ini menciptakan dampak positif yang tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga memberi harapan bagi masyarakat muda untuk terlibat aktif dalam pembangunan ekonomi negara mereka. Program-program tersebut juga berperan dalam mewujudkan tujuan jangka panjang PIF untuk menciptakan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan bagi negara-negara di kawasan Pasifik, termasuk Papua Nugini.

Pacific Islands Forum (PIF) telah memainkan peran penting dalam meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan di Fiji, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran dan peningkatan kualitas hidup. PIF mendukung program pelatihan vokasional yang ditujukan kepada pemuda, terutama mereka yang baru lulus dari sekolah menengah dan menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan. Program ini mencakup berbagai keterampilan praktis seperti pertukangan, tata boga, teknologi informasi, dan mekanik yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Kerja sama antara PIF, UNESCO Pacific, dan Kementerian Pendidikan Fiji memungkinkan perluasan program ini ke lebih banyak wilayah di Fiji.

Data yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan Fiji menunjukkan peningkatan partisipasi sekolah yang signifikan, yakni 85% pada tahun 2023, naik dari 78% pada 2020 (Fiji Ministry of Education, 2023). Salah satu faktor yang mendorong peningkatan ini adalah insentif pendidikan yang diberikan oleh PIF, seperti beasiswa dan bantuan untuk biaya sekolah. Program ini tidak hanya menasar anak muda yang baru lulus sekolah, tetapi juga orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan untuk membuka usaha mandiri. Khususnya, PIF menargetkan kelompok perempuan di daerah pedesaan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan membuat kerajinan tangan lokal yang dapat dipasarkan secara digital, menciptakan peluang pendapatan yang berkelanjutan. Program pelatihan yang telah dilakukan juga mencatat bahwa sekitar 3.000 peserta berhasil mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha baru dalam satu tahun.

setelah mengikuti pelatihan (*Pacific Islands Forum Secretariat*, 2023).

Dampak dari program pelatihan ini sangat positif, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kewirausahaan di kalangan masyarakat muda dan perempuan. Keberhasilan ini tidak hanya membantu individu untuk mandiri secara finansial, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Fiji.

Selain di bidang pendidikan, PIF juga berkontribusi besar dalam sektor kesehatan, khususnya bagi keluarga miskin yang kurang mendapatkan akses ke layanan kesehatan dasar. PIF bekerja sama dengan organisasi internasional seperti World Health Organization (WHO) dan Pacific Health Ministers untuk menyediakan bantuan medis dan peralatan kesehatan modern. Program ini menargetkan lebih dari 50.000 keluarga miskin di Fiji, terutama di daerah pedesaan yang memiliki fasilitas kesehatan terbatas. Bantuan yang diberikan mencakup pengadaan peralatan medis untuk rumah sakit daerah, distribusi obat-obatan esensial, serta pelatihan tenaga medis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (WHO, 2018).

Salah satu hasil nyata dari program kesehatan ini adalah penurunan angka kematian ibu dan bayi di Fiji. Menurut Zunnuraeni dkk., (2023) data dari WHO Pacific 2023 mencatat penurunan angka kematian ibu dari 34 per 100.000 kelahiran menjadi 25 per 100.000 pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan akses ke layanan kesehatan yang terjangkau dan aman, PIF dapat memberikan dampak besar dalam keselamatan ibu dan anak, yang sangat penting dalam konteks pembangunan sosial. Selain itu, dalam menghadapi

bencana alam seperti badai tropis dan banjir yang sering melanda Fiji, PIF juga memberikan respons cepat melalui program Pacific Humanitarian Pathway. Program ini memberikan bantuan darurat yang mencakup tempat tinggal sementara, makanan, air bersih, serta layanan kesehatan darurat. Infrastruktur yang rusak, seperti jalan dan sekolah, diperbaiki dengan dana bantuan dari PIF dan mitranya, termasuk Australia dan Selandia Baru.

Bantuan cepat yang diberikan oleh PIF dalam situasi bencana ini tidak hanya mempercepat pemulihan masyarakat, tetapi juga mencegah potensi terjadinya ketegangan sosial pasca-bencana, karena masyarakat dapat segera kembali ke kehidupan normal. PIF membuktikan peranannya dalam menjaga stabilitas sosial di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Fiji.

Papua Nugini menghadapi sejumlah tantangan dalam hal stabilitas sosial, termasuk konflik etnis dan kekerasan antarkelompok, terutama di daerah-daerah seperti Hela dan Southern Highlands. PIF berperan penting dalam proses rekonsiliasi melalui mediasi dan dialog damai antara kelompok yang bertikai. Bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP), PIF telah memfasilitasi berbagai sesi dialog yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta masyarakat lokal untuk menemukan solusi damai atas konflik yang terjadi. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kohesi sosial dan membangun kembali rasa saling percaya antar komunitas yang terpecah.

Selain itu, PIF memberikan bantuan langsung kepada lebih dari 50.000 pengungsi internal yang terdampak oleh

konflik etnis maupun bencana alam. Bantuan ini mencakup pembangunan tempat tinggal sementara, distribusi makanan pokok, air bersih, serta layanan psikososial yang penting untuk pemulihan trauma. Kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan juga turut mempercepat distribusi bantuan secara adil dan berbasis kebutuhan, sehingga membantu mencegah ketegangan sosial yang lebih lanjut. Laporan dari Human Rights Watch (2023) dan UNDP (2023) menunjukkan bahwa upaya rekonsiliasi ini telah berhasil menurunkan insiden kekerasan bersenjata di beberapa wilayah konflik, sebagai hasil dari pendekatan berbasis budaya lokal yang diterapkan PIF.

Keberhasilan PIF dalam memfasilitasi dialog damai di Papua Nugini menunjukkan bahwa organisasi ini tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah sosial, tetapi juga dalam membangun fondasi perdamaian yang lebih langgeng antara kelompok yang berbeda. Hal ini turut berkontribusi pada stabilitas sosial dan ketahanan masyarakat di Papua Nugini.

PIF juga aktif dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan di Papua Nugini, yang merupakan negara dengan tantangan geografis dan infrastruktur pendidikan yang terbatas. Dalam sektor pendidikan, PIF mendukung program Pacific Regional Education Framework (PacREF) dengan memberikan bantuan buku pelajaran, alat tulis, serta perlengkapan sekolah kepada lebih dari 1.000 sekolah dasar dan menengah di seluruh Papua Nugini. Selain itu, PIF menyediakan beasiswa kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, yang memungkinkan mereka untuk

melanjutkan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Program ini telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, dengan meningkatnya angka melek huruf di Papua Nugini. Data dari Papua New Guinea Department of Education (2023) mencatat bahwa angka melek huruf naik dari 61% menjadi 67% dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan kemajuan signifikan meskipun tantangan geografis dan infrastruktur pendidikan yang terbatas (Newman dkk., 2021).

Di sektor kesehatan, PIF turut mendukung pembangunan akses air bersih di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Kerja sama dengan WaterAid dan UNICEF berhasil memberikan akses air bersih dan sanitasi layak bagi lebih dari 100.000 keluarga di Papua Nugini. Selain itu, pembangunan klinik dan puskesmas di wilayah pedesaan juga diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya, lengkap dengan pelatihan tenaga medis dan distribusi vaksin dasar. Program ini membawa dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat, dengan angka kejadian penyakit yang berkaitan dengan air kotor seperti diare dan kolera menurun secara signifikan. Data dari Ministry of Health PNG (2023) menunjukkan penurunan yang jelas dalam jumlah kasus penyakit tersebut, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua Nugini.

Dengan dukungan dari PIF, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan di Papua Nugini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial jangka panjang di negara tersebut. PIF berperan dalam menciptakan ketahanan sosial yang lebih baik dengan memberikan

akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Papua Nugini.

Pacific Islands Forum (PIF) telah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial di wilayah Pasifik, termasuk Fiji dan Papua Nugini (Hariri, 2020). Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan struktural dan konteks lokal menjadi penghambat yang signifikan bagi keberhasilan program. Tantangan tersebut mencakup ketergantungan pada bantuan luar negeri, kendala birokrasi, dampak perubahan iklim, serta implikasi dari penerapan prinsip neoliberalisme dalam kebijakan pembangunan.

Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi *Pacific Islands Forum* (PIF) dalam menjalankan program di Fiji dan Papua Nugini adalah tingginya ketergantungan kedua negara tersebut terhadap bantuan luar negeri. Ketergantungan ini menjadikan keberlangsungan pembangunan sosial dan ekonomi rentan terhadap fluktuasi dana bantuan. Ketika bantuan dari donor internasional seperti Australia, Selandia Baru, atau lembaga global seperti Asian Development Bank (ADB) dan International Monetary Fund (IMF)—mengalami pengurangan, stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Fiji dan Papua Nugini dapat langsung terpengaruh (Djelantik, 2015).

Contohnya, pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 memaksa banyak negara donor untuk merealokasi dana ke kebutuhan domestik mereka, pendanaan untuk sejumlah program pembangunan di kawasan Pasifik mengalami pemotongan. Hal ini menyebabkan tertundanya

pelaksanaan proyek-proyek vital, seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, dan pengembangan UMKM (World Bank Pacific Update, 2021). Dalam jangka panjang, situasi ini mengindikasikan bahwa ketergantungan yang berlebihan terhadap bantuan eksternal bukanlah strategi yang berkelanjutan.

Menanggapi hal ini, PIF kini lebih aktif mendorong program-program pemberdayaan ekonomi lokal. Pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajemen usaha, dan akses permodalan untuk usaha kecil mulai diperluas di kedua negara tersebut. Program seperti *Pacific Trade Invest* dan *Business Link Pacific* telah menjadi contoh nyata bagaimana PIF dan mitranya mencoba membangun fondasi ekonomi lokal yang lebih kuat. Di Fiji, program pelatihan UMKM telah menjangkau lebih dari 2.000 pelaku usaha mikro pada tahun 2023, dan hampir separuhnya berhasil meningkatkan omzet usaha dalam enam bulan pasca pelatihan (Hinton, 2021).

Langkah ini penting untuk menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang, sehingga ketika dana bantuan internasional menurun, negara-negara seperti Fiji dan Papua Nugini masih dapat mempertahankan laju pembangunan dan layanan publik secara mandiri. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi, dukungan pemerintah nasional, serta kemampuan masyarakat lokal dalam menyerap manfaat pelatihan dan fasilitas yang diberikan.

Selain masalah ketergantungan ekonomi, tantangan lain yang cukup besar dalam pelaksanaan program *Pacific Islands Forum* (PIF) di Fiji dan Papua Nugini adalah kendala birokrasi dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat,

pemerintah daerah, dan lembaga pelaksana program. Dalam banyak kasus, prosedur perizinan yang rumit dan waktu pengambilan keputusan yang lambat menjadi hambatan utama dalam percepatan implementasi proyek-proyek pembangunan.

Contohnya, dalam laporan *Pacific Islands Forum* Sekretariat tahun 2022, disebutkan bahwa sekitar 30% dari proyek kerja sama PIF mengalami keterlambatan implementasi selama lebih dari enam bulan akibat proses administrasi lokal yang tidak efisien. Di Papua Nugini, hambatan paling umum termasuk lambannya pengesahan anggaran pemerintah lokal, keterbatasan sumber daya manusia dalam instansi teknis daerah, serta tumpang tindih kewenangan antara lembaga pusat dan daerah (ESCAP, 2023).

Kurangnya koordinasi juga berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat penerima manfaat. Banyak program bantuan yang tidak disosialisasikan secara menyeluruh, sehingga penerima manfaat tidak memahami tujuan program dan tidak terlibat aktif dalam pelaksanaannya. Akibatnya, sebagian bantuan tidak termanfaatkan secara optimal, bahkan ada yang tidak tepat sasaran. Ini memperkuat kesenjangan antara kebijakan tingkat pusat dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Untuk mengatasi tantangan ini, PIF dan mitra kerjanya mulai menginisiasi pendekatan *whole-of-government* dan *community-based planning*. Pendekatan ini mendorong adanya keterlibatan dari semua level pemerintahan dan komunitas lokal sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program. Di Fiji, program *National Development Planning Dialogue* yang dimulai sejak 2022 menjadi contoh positif,

di mana masyarakat lokal dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa bersama pejabat daerah, LSM, dan mitra pembangunan (Zulkarnain, 2024).

Selain itu, digitalisasi sistem birokrasi juga menjadi prioritas. Dengan memperkuat e-governance, proses perizinan dan pelaporan diharapkan menjadi lebih cepat dan transparan. Di Papua Nugini, program *e-Procurement System* yang didukung oleh ADB dan PIF pada 2023 menjadi langkah awal untuk mempercepat alur administrasi proyek bantuan (IMF, 2023).

Meskipun demikian, perbaikan birokrasi adalah proses jangka panjang. Diperlukan komitmen politik, peningkatan kapasitas SDM pemerintah, serta dukungan dari lembaga internasional untuk memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan benar-benar bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas secara merata.

Fiji dan Papua Nugini adalah dua negara kepulauan yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam. Letak geografis mereka yang berada di kawasan Pasifik Selatan menjadikan badai tropis, banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut sebagai ancaman nyata yang berulang setiap tahun. Dalam konteks ini, tantangan besar bagi *Pacific Islands Forum* (PIF) adalah bagaimana menjaga kesinambungan program pembangunan di tengah ancaman alam yang tidak terduga.

Menurut laporan *Pacific Climate Change Science Program* (PCCSP, 2023), suhu di kawasan Pasifik telah meningkat rata-rata 1,2°C sejak tahun 1950, dengan frekuensi badai dan curah hujan ekstrem yang makin tinggi. Di Fiji, Badai Tropis Yasa tahun 2020 menyebabkan kerugian

ekonomi lebih dari USD 250 juta dan menghancurkan lebih dari 6.000 rumah serta ratusan fasilitas publik (ESCAP, 2022). Infrastruktur yang sebelumnya dibangun melalui program bantuan PIF pun ikut rusak, sehingga memaksa organisasi ini untuk kembali mengucurkan dana bantuan darurat dalam skala besar.

Hal serupa terjadi di Papua Nugini, di mana banjir besar di daerah dataran rendah Morobe dan Gulf Province menyebabkan lebih dari 15.000 orang mengungsi pada tahun 2022. Jalan utama dan fasilitas kesehatan yang didanai oleh proyek-proyek regional mengalami kerusakan berat (Kumme & Samanta, 2023). Situasi ini membuat PIF harus mengalokasikan kembali anggaran yang semula untuk pembangunan jangka panjang menjadi bantuan darurat dan rehabilitasi pasca bencana.

Kenaikan permukaan laut juga menjadi ancaman besar, terutama bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Fiji dan Papua Nugini. Menurut Pacific-Australia Climate Change Science and Adaptation Planning Program (PACCSAP), permukaan laut di wilayah ini naik rata-rata 7 mm per tahun, dua kali lipat dari rata-rata global. Hal ini menyebabkan erosi pantai, hilangnya lahan pertanian, dan pengungsian internal yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi (Aulia, 2023).

Sebagai respons, PIF telah bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNDP, Green Climate Fund, dan Pacific Resilience Partnership (PRP) untuk memperkuat ketahanan iklim. Beberapa program strategis termasuk pembangunan infrastruktur ramah bencana, pelatihan komunitas dalam mitigasi risiko, serta pengembangan sistem peringatan dini

berbasis satelit. Di Fiji, program *Climate Resilient Infrastructure for Fiji* (CRIF) berhasil membangun jalur evakuasi baru dan memperkuat bangunan sekolah serta rumah sakit agar tahan terhadap badai (ADB, 2023).

Meski begitu, tantangan terbesar tetap pada keterbatasan anggaran dan kapasitas lokal dalam mengelola risiko secara mandiri. Ketergantungan pada donor masih tinggi, dan kebutuhan untuk investasi dalam teknologi adaptasi terus meningkat. Maka dari itu, selain fokus pada penanganan pasca bencana, strategi jangka panjang yang bersifat preventif dan berbasis komunitas harus menjadi prioritas utama PIF dan seluruh mitra regionalnya.

Dalam menjalankan program-program ekonominya, *Pacific Islands Forum* (PIF) banyak mengadopsi pendekatan yang berakar dari prinsip neoliberalisme. Pendekatan ini menekankan pentingnya pasar bebas, liberalisasi perdagangan, privatisasi layanan publik, serta mendorong masuknya investasi asing untuk mempercepat pembangunan. Secara teori, strategi ini dianggap mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi sektor publik. Namun, penerapannya di negara-negara berkembang seperti Fiji dan Papua Nugini menghadirkan sejumlah dilema dan tantangan tersendiri.

Di Fiji, kebijakan promosi investasi asing yang difasilitasi melalui *Fiji Trade and Investment Bureau* menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan real estate memang tumbuh pesat. Misalnya, investasi asing langsung (FDI) di sektor pariwisata meningkat sebesar 18% pada 2022 dibanding tahun sebelumnya (Fiji Bureau of Statistics, 2023). Namun, keberhasilan ini juga diiringi dengan meningkatnya

kepemilikan asing atas tanah dan properti lokal, yang memicu kekhawatiran atas hilangnya kontrol masyarakat lokal terhadap aset strategis. Selain itu, masuknya investor asing sering kali tidak disertai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal karena posisi manajerial masih banyak diisi oleh tenaga kerja asing.

Dalam Batiran (2024) di Papua Nugini, penerapan neoliberalisme terlihat dalam kebijakan privatisasi layanan publik dan deregulasi pasar. Misalnya, liberalisasi sektor telekomunikasi dan energi memang menciptakan lebih banyak pilihan layanan bagi konsumen, namun juga menyebabkan kenaikan harga di beberapa daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh perusahaan swasta. Hal ini memperkuat kesenjangan antara wilayah urban dan rural. Selain itu, ketergantungan pada perusahaan asing di sektor pertambangan seperti ExxonMobil dan Barrick Gold menimbulkan risiko ketidakstabilan apabila perusahaan-perusahaan tersebut menghentikan operasinya secara tiba-tiba.

Prinsip pasar bebas yang diterapkan dalam kebijakan perdagangan juga membuat produk-produk lokal menghadapi tekanan dari produk impor yang lebih murah. Di Papua Nugini, banyak pelaku UMKM lokal yang kesulitan bersaing dengan barang impor dari Australia, Cina, dan Selandia Baru. Hal ini memunculkan paradoks: di satu sisi, terbukanya perdagangan mendorong efisiensi dan konsumsi; namun di sisi lain, melemahkan kemampuan produksi dalam negeri dan menciptakan ketergantungan pada barang luar.

PIF mencoba mengatasi risiko-risiko tersebut dengan menciptakan kerangka kebijakan yang inklusif, seperti melalui *Framework for Pacific*

Regionalism dan *Blue Pacific Strategy*. Strategi ini menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berbasis komunitas dan menghormati kedaulatan ekonomi nasional. PIF juga berupaya meningkatkan kapasitas negara-negara anggotanya agar mampu menegosiasikan perjanjian perdagangan dan investasi dengan lebih adil, serta mendorong tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari investor asing (Aulia, 2023).

Namun demikian, penerapan prinsip neoliberalisme tetap membutuhkan pengawasan ketat dari pemerintah dan masyarakat sipil. Tanpa regulasi yang memadai, risiko eksploitasi sumber daya alam dan pengabaian hak-hak masyarakat lokal bisa semakin meningkat. Oleh karena itu, penting bagi Fiji dan Papua Nugini untuk menyeimbangkan antara pembukaan ekonomi dengan proteksi terhadap sektor-sektor strategis nasional, guna memastikan bahwa manfaat dari investasi dan pasar bebas benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Jadi kesimpulannya, PIF berperan besar dalam meningkatkan ekonomi dan stabilitas sosial di Fiji dan Papua Nugini. Program-program yang dijalankan membantu sektor pariwisata, pertanian, perikanan, serta usaha kecil dan menengah. Selain itu, PIF juga mendukung layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan darurat bagi korban bencana. Meskipun telah dilakukan seperti ini, masih ada tantangan seperti ketergantungan pada bantuan luar, birokrasi yang lambat, dan dampak perubahan iklim yang ada di Fiji dan Papua Nugini di dalam kenyataan nya sehari-hari.

Sarannya, PIF bisa mencoba memperkuat program pelatihan

keterampilan dan wirausaha agar masyarakat lebih mandiri. Selain itu, pemerintah setempat perlu lebih aktif dalam mengelola sumber daya alam dan mengurangi ketergantungan pada investor dari pihak luar. PIF juga harus memperbaiki koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat agar bantuan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. S. R., Danastri, H. D., Maulidina, C., Junadhi, F., Shakila, L. M., & Aulia, T. A. (2022). Relevansi Negara Oseania Dalam Diplimasi Iklim Di PBB. *Jurnal Good Governance*, 18(1), 1–3.
- Asian Development Bank. (2023). *Fiji: Sustainable and Resilient Recovery Program*. Asian Development Bank.
- Aulia, E. (2023). UPAYA PACIFIC ISLAND FORUM DALAM MENGATASI MASALAH PERUBAHAN IKLIM DI KAWASAN KEPULAUAN PASIFIK. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 10(2), 654-664
- Aulia, E. (2023). UPAYA PACIFIC ISLAND FORUM DALAM MENGATASI MASALAH PERUBAHAN IKLIM DI KAWASAN KEPULAUAN PASIFIK. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 10(2), 654-664.
- Aulia, E., & Marzaman, A. P. (2023). UPAYA PACIFIC ISLAND FORUM DALAM MENGATASI MASALAH PERUBAHAN IKLIM DI KAWASAN KEPULAUAN PASIFIK. *Wacana :* Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin, 10(2), 654–656.
- Australian Centre for International Agricultural Research. (2024). *Indonesia*. ACIAR.
- Batiran, K. B. (2024). *Ekologi Politik Solusi Lingkungan di Indonesia: Aktor, Kepentingan dan Relasi Kuasa* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). *Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis*. Ugm Press.
- Djelantik, S. (Ed.). (2015). *Asia-Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi dan Antarkawasan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- ESCAP, U. (2022). Pacific perspectives 2022: accelerating climate action.
- ESCAP, U. (2023). Advancing pacific priorities 2023.
- Fadhilah, M. (2019). Inkonsistensi Kebijakan Luar Negeri Melanesia Spearhead Group (MSG) dalam Isu Papua Barat: Studi Kasus Fiji dan Papua Nugini. *Indonesian Perspective*, Vol. 4(No. 1), 59–81.
- Fiji Bureau of Statistics. (2023). *Fiji Bureau of Statistics*. Fiji Bureau of Statistics.
- Gao, J., Jia, R., & Su, Q. (2022). *G20 entrepreneurship services report*. Palgrave Macmillan.
- Girard, C., Amin, S. N., & Watson, D. (2021). Reframing security in Pacific Island Countries and Territories. *Development Bulletin*, 82, 23.
- Gunawan, C. I., & Yulita, S. E. (2020). *Anomali Covid-19:*

- Dampak Positif Virus Corona Untuk Dunia.* IRDH Book Publisher.
- Hariri, S. N. (2020). PERSAINGAN CHINA-AUSTRALIA DALAM PEREBUTAN PENGARUH DI KAWASAN PASIFIK. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 4(1), 33–45. <https://doi.org/10.33541/japs.v4i1.1640>
- Hariri, S. N. (2020). Persaingan China-Australia Dalam Perebutan Pengaruh Di Kawasan Pasifik. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 4(1), 33-45.
- Herawati, A. R., Yuniningsih, T., & Dwimawanti, I. H. (2024). *Governansi dalam Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan: Melihat Kebijakan Indonesia dan New Zealand.* Deepublish.
- Hinton, J. (2021). *Beekeeping, finance, and development: an exploration of development interventions in Fiji* (Doctoral dissertation, Southern Cross University).
- Human Rights Watch. (2023). *Laporan Dunia 2023.* Human Rights Watch.
- Imanulloh, E. R., & Rijal, N. K. (2022). Upaya indonesia dalam mendorong prioritas perekonomian negara berkembang melalui G20: perspektif hyper-globalist. *Indonesian Perspective*, 7(1), 79-101.
- International Monetary Fund. (2023). *Artikel: A001 - IMF.* IMF eLibrary.
- Jumaedi, M., & Adha, R. (2024). Pengaruh Foreign Direct Investment dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode tahun 1981-2022. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3), 151-167.
- Kuleshov, Y., Jones, D., Hendon, H., Charles, A., Shelton, K., de Wit, R., ... & Kaniaha, S. (2013, April). Pacific-Australia Climate Change Science and Adaptation Planning program: supporting climate science and enhancing climate services in Pacific Island Countries. In *EGU General Assembly Conference Abstracts* (pp. EGU2013-1085).
- Kumne, W., & Samanta, S. (2023). Geospatial Mapping of Inland Flood Susceptibility Based on Multi-Criteria Analysis-A Case Study in the Final Flow of Busu River Basin, Papua New Guinea. *International Journal of Geoinformatics*, 19(6).
- Leo, B. (2011). New SME Financial Access Initiatives: Private Foundations' Path to Donor Partnerships. *Center for Global Development Working Paper*, (254).]
- Mahmudah, D. (2020). Upaya pemberdayaan tik dan perlindungan generasi z di era digital. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 1(01).
- Newman, L., Pelosi, A., Zino, G., Crespi, S., & Gordon, R. (2021). Education systems for girls' education in the Indo-Pacific region.
- Prabhakar, A. C. (2024). Charting paths to Pacific integration: A comparative study of FIPIC and CPIDF strategies for sustainable, inclusive, and self-reliant development in Papua New Guinea. *Review of*

- Socio-Economic Perspectives*, 9(1), 79-90.
- Pugu, M. R. (2024). Literature Review: Strategi Pemasaran Meningkatkan Daya Saing Bagi Produk Halal, Kedai-UMKM Halal, Dan Pariwisata Halal. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9–9(5). <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i5>
- Purnama, W. O. S. R. (2019). Aplikasi Soft Balancing Australia Sebagai Upaya Mengimbangi Pengaruh Tiongkok Di Papua Nugini Pada Tahun 2015-2019.
- Sihaloho, R. a. H., Abbas, R. J., & Anggraeni, S. D. (2022). Strategi Manuver Geoekonomi Indonesia Dalam Merespons Dukungan Negara-Negara Pasifik Selatan Atas Isu Kemerdekaan Papua. *Jurnal Kajian Wilayah*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.14203/jkw.v12i1.855>
- Singh, A., & Patra, A. (2024). India Vision and Support for Development in Papua New Guinea (PNG). *Interdisciplinary Journal of Papua New Guinea University of Technology*, 1(2).